



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>

Received: 12 Maret 2024, Revised: 14 April 2024, Publish: 17 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Program Sekolah Politisi Muda Sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta

Dewi Handayani¹, Najamudin², Badrin³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia, dewi15.handayani@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia

Corresponding Author: dewi15.handayani@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of the young politician school program as political education for prospective legislative members at the Satunama Yogyakarta Foundation. This research uses a qualitative approach with a descriptive design. Research subjects were determined using purposive techniques. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data validation uses source triangulation techniques. Meanwhile, data analysis uses interactive modeling techniques. The research results show that the Satunama Foundation strives to provide good facilities and infrastructure to support the implementation of the young politician school program. In implementing the program, not all participants looked active and some looked tired, this was due to personality and budget problems for each individual, which made the committee allocate a little time, but the committee tried to improve the quality of the young politician school program by distributing questionnaires to participants as material. Future evaluations and the number of young politician school program alumni who have succeeded in becoming legislative members are one of the supporting factors for the committee in improving the quality of the young politician school program.*

Keyword: *Political Education, Legislative, Young Politician School Program.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik bagi calon anggota legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan analisis data menggunakan teknik model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Satunama berusaha memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang pelaksanaan program sekolah politisi muda. Dalam pelaksanaan program tersebut tidak semua peserta terlihat aktif dan ada yang terlihat lelah, hal tersebut berasal dari pribadi masing-masing setiap individu dan masalah anggaran sehingga membuat panitia mengalokasikan waktu sedikit padat tetapi panitia berusaha memperbaiki kualitas program sekolah politisi muda dengan membagikan angket kepada peserta sebagai bahan

evaluasi kedepannya dan banyaknya alumni program sekolah politisi muda yang telah berhasil menjadi anggota legeslatif merupakan salah satu faktor pendukung bagi panitia untuk memperbaiki kualitas program sekolah politisi muda.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Legislatif, Program Sekolah Politisi Muda.

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap bangsa Indonesia terutama di bidang politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beberapa kali perubahan pada amandemennya, perubahan Undang-undang Dasar 1945 dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002, tercatat sudah empat kali terjadi amandemen. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem politik yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia yang masih mengalami pertumbuhan dalam pelaksanaannya. Demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki ciri yang khas yang memuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Budiardjo, 2013: 106).

Dampak dari adanya reformasi di Indonesia di bidang politik salah satunya banyak bermunculan partai-partai politik yang berasaskan nasionalisme dan agama, korupsi, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Pemerintahan pada masa Orde Baru membuat kepribadian masyarakat menjadi pasif, banyak masyarakat yang takut untuk menyampaikan aspirasi karena adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial. Kehadiran partai politik seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar lebih dalam mengenai pendidikan politik dan menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Namun kenyataannya pada masa Orde Baru ini partai politik tidak berkembang dan terkesan pasif karena kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden. Seperti yang diungkapkan oleh Handoyo & Lestari (2017: 96) partai politik merupakan salah satu wadah dan perkumpulan yang berusaha terlibat dalam urusan politik demi menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, karena wadah dan perkumpulan ini memiliki visi dan misi yang sejalan dengan harapan mereka. Dengan adanya partai politik ini diharapkan pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dalam membuat kebijakan karena ada kontrol dari masyarakat yang menjadi bagian dari partai politik.

Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik mengenai kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara masih rendah karena metode dan evaluasi yang diberikan kurang aplikatif, konseptual dan tidak berjalan dengan efektif, hal ini tentunya berdampak terhadap rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat (Saputro, 2015: 35). Peran parpol dalam mengajarkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan masih terdapat kesenjangan karena kurangnya sumber dana yang dimiliki partai politik, kurangnya kesadaran politik dari masyarakat dan partai politik memiliki ambisi terhadap kekuasaan (Nasution, 2012: 35).

Belajar politik merupakan sesuatu yang seharusnya diberikan bagi rakyat di suatu negara agar mereka tahu hak dan kewajibannya di dalam negara. Hak dan kewajiban selaku warga negara sebagai insan politik yang mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan. Proses pendidikan politik harus diterapkan sejak dini karena ini akan menjadi bekal ketika mereka dewasa nanti. Betapa pentingnya pendidikan politik bagi rakyat Indonesia maka menjadi harapan agar pendidikan politik bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Belajar politik akan membawa perubahan besar terhadap kesadaran politik dan partisipasi politik rakyat Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan dan sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan pendidikan politik untuk menghasilkan warga negara yang melek akan dunia politik sehingga melalui bekal pendidikan politik warga negara tersebut sadar akan seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada setiap diri individu sebagai bagian dari negara, warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah apabila kebijakan yang

dibuat menyimpang dan warga negara berhak menduduki kursi politik demi kemajuan negara (Handoyo & Lestari, 2017: 15).

Kesadaran politik antara masyarakat kota dan desa sangat berbeda, tingkat kesadaran politik masyarakat kota cenderung lebih tinggi dalam partisipasi politik sedangkan tingkat kesadaran masyarakat desa cenderung lebih rendah dalam partisipasi politik karena masyarakat desa masih merasa takut untuk menyampaikan pendapat. Seperti yang diungkapkan oleh Anggara (2013: 123) kesadaran politik masyarakat yang berada dalam perekonomian rendah mempengaruhi rendahnya kesadaran mereka di dalam dunia politik karena mereka fokus memikirkan kebutuhan hidup mereka agar terus dapat bertahan hidup. Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan politik untuk itu perlu adanya pendidikan politik. Pendidikan politik dapat membentuk insan politik yang sadar terhadap kedudukan mereka dalam dunia politik dan merupakan pendukung bagi bergeraknya demokrasi di Indonesia.

Indonesia sedang berada di arus demokratisasi dan kebebasan dalam politik. Banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini dengan menghalalkan cara-cara yang tidak baik untuk kepentingan individu. Misalnya, melakukan *money politic* atau korupsi. *Money politic* atau korupsi sering terjadi ketika menjelang pemilih umum ini disebabkan karena tingkat percaya diri dan pemahaman mengenai pendidikan politik seseorang yang akan menduduki kursi dipemerintahan itu rendah, mereka melakukan perbuatan *money politic* atau korupsi agar mendapatkan suara terbanyak dan bisa memenangkan kursi dipemerintahan. Masyarakat yang menerima uang dari hasil *money politic* atau korupsi bisa jadi merupakan individu-individu yang tidak paham mengenai dunia politik dan tidak mengerti bahwa kontribusi mereka dalam dunia politik akan membawa perubahan bagi sistem politik dinegaranya. Pada dasarnya mengikuti pendidikan politik juga tidak menjamin bahwa seseorang akan terbebas dari *money politic* atau korupsi namun pendidikan politik dapat menjadi bekal bagi masyarakat dalam mengenali dunia politik sehingga masyarakat mampu berpikir bijaksana sebelum mengambil keputusan dan tindakan.

Korupsi merupakan perbuatan dan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan kedaulatan dalam pemerintahan yang melahap uang negara yang merupakan hak rakyat secara sembunyi-sembunyi untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri, orang-orang seperti itu biasanya di sebut sebagai koruptor (MacWilliam & Rafferty, 2017: 13). Kasus korupsi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, hal ini dibuktikan dengan banyak tertangkapnya para koruptor dari berbagai lembaga dan instansi yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia bahkan sudah mengatur dengan jelas mengenai sanksi yang akan diberikan bagi individu yang terlibat korupsi. Hukuman dan sanksi yang diberikan oleh Negara sudah tegas, namun seakan tidak membuat jera para pelaku korupsi. Budaya korupsi yang tercermin di Indonesia merupakan budaya yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial yang menjajah Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia sudah memasuki level penyakit sosial yang berbahaya karena dari zaman orde lama hingga era reformasi semakin berkembang dan dan meningkat subur (Srnita, 2016: 1893).

Maraknya kasus-kasus yang terjadi dalam dunia politik di negara kita tentu membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh MacWilliam & Rafferty (2017: 13) dampak buruk jika individu melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk dirinya saja melainkan berdampak pula terhadap negara karena menyebabkan berbagai masalah menimpa negara tersebut, seperti kemiskinan meningkat, pertumbuhan ekonomi melemah, krisis kepercayaan, negara dirugikan dan lain sebagainya. Dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat para anggota pemerintahan seharusnya menjadi pembelajaran bagi calon anggota legislatif yang akan menduduki jabatan dipemerintahan nanti agar lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.

Salah satu dampak dari adanya kasus korupsi dan sikap tidak disiplin anggota legislatif munculnya pandangan buruk rakyat terhadap para wakil rakyat yang menduduki posisi pemerintahan. Pandangan buruk ini akan menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan

masyarakat dunia politik. Hal ini disebabkan karena sebagian dari mereka yang duduk di kursi pemerintahan tidak mampu menepati janjinya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang telah memilihnya seperti melakukan korupsi. Krisis kepercayaan ini membuat masyarakat menjadi was-was dan takut untuk memilih calon wakil rakyat kembali, pandangan buruk mengenai politik seolah membayangi pikiran rakyat. Hasil penelitian Handaningrum & Rini (2014: 233) menunjukkan bahwa persepsi dan kepercayaan politik mahasiswa Untag Surabaya terhadap calon legislatif masih rendah.

Apabila krisis kepercayaan dari masyarakat terus meningkat maka ini akan berdampak kepada tingkat golput dalam pemilihan umum, masyarakat yang kecewa terhadap wakil rakyat yang tidak amanah dalam menjalankan jabatannya akan berpikir bahwa lebih baik menghindari pemilihan umum atau golput dari pada salah memilih wakil rakyat kembali. Bayangan suram mengenai perilaku buruk wakil rakyat yang menyalahgunakan jabatan seakan menghantui pikiran masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan bisa menimpa semua wakil rakyat yang tidak memiliki rasa amanah dan tanggungjawab dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemilihan umum seharusnya menjadi wadah bagi rakyat untuk memberikan hak pilih bagi calon anggota legislatif dan eksekutif yang menjadi pilihannya karena suara yang diberikan oleh rakyat merupakan penentu bagi kemajuan negara ini. Golput merupakan tindakan yang tidak demokratis untuk itu sebagai *good citizen* kita berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum demi tercapainya demokrasi yang maju dan berkembang.

Tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilihan terus mengalami penurunan setiap tahun. Berdasarkan data dari KPU angka partisipasi pemilihan umum calon anggota legislatif menurun seperti pada tahun 2004 berjumlah 84% dan tahun 2009 berjumlah 71%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menurun karena adanya ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan dan partai politik (Rizkiyansyah, 2014: 1).

Partisipasi politik warga negara yang rendah dalam menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum dapat diatasi dengan cara mengikuti pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga negara untuk meningkatkan pemahaman politik warga negara sehingga mau berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menggunakan haknya sebagai warga negara (Masputri, 2019: 68). Kehadiran pendidikan politik bagi calon anggota legislatif sangat penting dalam menjadi jalan penentu bagi lahirnya wakil rakyat yang bertanggungjawab. Seorang individu yang menjadi anggota partai politik akan menjadi aktif berpartisipasi dalam politik karena dengan mengikuti pendidikan politik akan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berpengaruh terhadap setiap individu yang menjadi bagian dari proses pendidikan politik (Sirivunnabood, 2016: 186).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek dalam penelitian ini adalah: 1) Pengurus Yayasan Satunama, 2) Pembicara Program Sekolah Politisi Muda, 3) Peserta atau Alumni Program Sekolah Politisi Muda. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan analisis data menggunakan teknik model interaktif yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis, membaca seluruh data, mengkodekan data, mengimplementasikan kode data untuk menentukan tema dan deskripsi data, menghubungkan tema atau deskripsi data, dan menafsirkan makna tema atau deskripsi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sekolah Politisi Muda sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta

Dinamika dunia perpolitikan Indonesia mengarah pada politik yang dibatasi hanya pada persoalan perebutan kekuasaan pada saat pemilihan umum. Banyaknya permasalahan politik seperti maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat lembaga legislatif menyebabkan kepercayaan rakyat menjadi rendah yang berdampak terhadap meningkatnya angka golput dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan politik di Indonesia masih rendah. Konsep landasan pendidikan politik di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Selain itu, landasan pendidikan politik di Indonesia juga diatur dalam Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika (Handoyo & Lestari 2017, 13-14).

Pendidikan politik dirancang untuk memberikan motivasi dan pertolongan kepada individu untuk partisipasi dalam mewujudkan hak dan kewajiban setiap individu agar sadar bahwa keterlibatan individu dalam politik dapat mempengaruhi budaya politik di masa depan (Nilgun, 2015: 1886). Pergantian kekuasaan dari setiap rezim selalu menjadikan partai politik sebagai aktor utamanya. Partai politik mempunyai pertimbangan normatif dan historis dalam memainkan peran penting dalam politik (Pittoors, 2020: 50). Sedangkan menurut Jumaidi & Yakooop (2013: 18) sumber kekuatan dan aktor utama dalam dinamika politik adalah partai politik. Perjalanan politik baik pada tingkat nasional sampai lokal masih dimaknai sebagai pengertian politik yang bernada negatif dikalangan masyarakat.

Pendidikan politik tidak hanya bisa dilakukan oleh partai politik melainkan juga dapat dilaksanakan oleh beberapa agen-agen seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, media massa, media elektronik dan lain sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan politik selain di sekolah formal juga dapat dilaksanakan dalam lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi non pemerintahan (Kus & Tarhan, 2016: 474-476). Pendidikan politik pada masa prakemerdekaan justru banyak dilakukan oleh banyak organisasi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat Indonesia (Handoyo & Lestari, 2017: 74).

Yayasan Satunama sebagai salah satu organisasi yang memiliki tujuan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat merasa tergerak untuk mengambil tindakan yang diharapkan kedepannya mampu mengembalikan marwah makna politik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya keinginan untuk mengembalikan marwah politik membuat Yayasan Satunama bekerjasama dengan beberapa partai politik di beberapa daerah Indonesia untuk mengadakan pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda dengan sasaran adalah para politisi muda lintas partai politisi muda.

Perencanaan adalah rangkaian persiapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan adalah sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang ingin dicapai. Sumber daya tersebut yakni perencanaan, kelembagaan, perangkat pembelajaran, penilaian, kualitas guru, sarana prasarana, dan evaluasi. Jika salah satu sumber daya tersebut memiliki kekurangan maka dapat menjadi kendala dalam proses pembelajaran (Arwildayanto et al. 2018: 199). Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Yayasan Satunama dalam merencanakan pelaksanaan program sekolah politisi muda dilakukan oleh dewan pengurus Yayasan Satunama sudah diupayakan dengan maksimal. Hal itu dilihat dari kesiapan yang telah dilakukan dewan pengurus Yayasan Satunama diantaranya: tujuan program, sasaran program, merumuskan kepanitian, jadwal pelaksanaan, perangkat pembelajaran, materi, pemateri, sarana prasarana, kerjasama dengan pihak eksternal, dan lain sebagainya.

Program sekolah politisi muda merupakan pendidikan politik yang digagas oleh Yayasan Satunama dengan tujuan untuk: 1) melahirkan kader-kader politisi muda yang

memiliki visi dan komitmen yang kuat pada pengembangan kultur politik yang demokratis (*democratic and civilized political life*) dan memiliki kapasitas politik untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan spesifik dan hak-hak rakyat; 2) meningkatkan kapasitas politisi muda (pengurus partai politik) sebagai *subjek politik* yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia; 3) meningkatkan kepekaan politisi muda (pengurus partai politik) terhadap problem sosial dan tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia; dan 4) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politisi muda tentang urgensi politik sebagai media perjuangan dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, kebutuhan dan hak rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Zhang & Fagan (2016: 138) pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan kepatuhan, patriotisme, sosialisme, dan nasionalisme setiap individu dalam memahami dunia politik. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan kepartaian.

Jika warga negara ingin mempengaruhi politik, maka warga negara harus terlibat dalam gerakan politik atau menjadi anggota partai politik (Keman & Woldendrop, 2016: 165). Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Satunama dalam menentukan sasaran peserta yang boleh mengikuti program sekolah politisi muda. Sasaran peserta program sekolah politisi muda adalah para politisi muda anggota partai politik lintas partai. Para politisi muda ini merupakan anggota partai politik yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif daerah yang diwakilinya. Lembaga legislatif mempunyai kekuatan untuk merumuskan pembentukan undang-undang yang baru, mengadakan musyawarah yang berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut urusan publik dan mempunyai tugas untuk mengawasi eksekutif (Arter, 2006: 254-255).

Badan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada dalam wilayah kerja yang berbeda. DPR ada yang berada dalam profil tinggi wilayah kerjanya mencakup semua daerah yang berada dalam negaranya sedangkan DPR dalam profil lokal berada dalam wilayah kerja yang mencakup daerah tingkat yang diwakilinya. Untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maka harus berada dalam bendera partai. Para kandidat anggota legislatif daerah pemilihan lokal maupun nasional harus mendapatkan persetujuan dari daerah pemilihan lokal dan melakukan kampanye pencalonan lokal di daerah pemilihan sebelum pemungutan suara digelar (Koop & Bittner, 2011: 431-435).

Setiap individu harus menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memberikan suaranya untuk memilih calon pejabat negara baik lembaga legislatif maupun eksekutif tingkat daerah maupun provinsi ketika pemilihan umum berlangsung. Warga negara juga harus mempertimbangkan kualitas calon pejabat pemerintahan yang dipilih merupakan orang-orang yang memiliki integritas, beretika, memiliki visi dan misi yang jelas, dan bersih dari kasus korupsi. Karena suara setiap individu menentukan masa depan negara Indonesia. Perekrutan dan pemilihan anggota badan legislatif provinsi maupun daerah membutuhkan perhatian rakyat. Karena perhatian rakyat dapat membawa kedalam kehidupan politik negara yang lebih baik (Williams, 1967: 98-99).

Kelembagaan atau struktur organisasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang ingin dicapai (Arwildayanto et al. 2018: 199). Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Satunama. Kepanitiaan program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama berada dalam Departemen Politik Demokrasi dan Kebebasan Beragama Berkeyakinan Inklusi Sosial khususnya Departemen Bidang Politik dan Demokrasi. Departemen ini tentu bergerak dalam urusan politik dan demorasi yang bertugas mengadakan pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda dan program politisi cerdas berintegritas.

Program sekolah politisi muda berlangsung selama 8 bulan (on-off). Selama 8 bulan tersebut peserta harus mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan yaitu adanya *preliminary meeting* dengan pemimpin partai, sekolah politisi muda I yang dilaksanakan

selama 7 hari, sekolah politisi muda II yang dilaksanakan selama 5 hari, sekolah politisi muda III yang dilaksanakan, worksop dan asistensi penyusunan rencana aksi, workshop dan asistensi penyusunan aksi kebijakan, seminar dan wisuda peserta sekolah politisi muda, pertemuan pimpinan mitra, dan konsolidasi kaukus politisi muda lintas partai. Kemudian sekolah pertama berlangsung 6 hari dengan metode kelas dan outbond dengan fokus pada materi etika politik, *charater building*, analisis sosial dan politik, analisis kebijakan, komunikasi politik, manajemen konflik, partai politik, sistem politik, perilaku pemilih, dan *marketing politics*. Sekolah kedua berlangsung 4 hari dengan fokus materi strategi membangun konstituen, komunikasi politik, dan analisa dan penyusunan kebijakan publik. Sekolah ketiga berlangsung 4 hari dengan kelas panel dengan fokus materi menyusun *strategi thinking* dalam bidang politik, *value building* dan *living value*, dan pembuatan dan finalisasi kertas kebijakan. Selama kelas berlangsung peserta harus turun kelapangan mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi ke masyarakat dengan asistensi dan pendampingan. Data dan permasalahan tersebut harus disusun menjadi rencana aksi politik

Sumber daya dalam pengajaran pendidikan politik berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar dan berdaya memberikan masukan terkait kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk arah perkembangan politik yang lebih baik. Sumber daya tersebut meliputi guru yang berkompenten dibidangnya, kurikulum yang sesuai, dan program pendidikan yang tepat (Quraishi & Rahman, 2009: 34). Perangkat pembelajaran seperti RPP, kurikulum, silabus dan lain sebagainya yang digunakan untuk pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik di Yayasan Satunama menggunakan program brief. Didalam program brief memuat tentang latar belakang program, tujuan program, target program, kelompok sasaran, wilayah sasaran, kegiatan selama 5 tahun, alur konseptual program, tahap sekolah, materi pembelajaran, manajemen waktu, lembar penilaian, metode dan media pembelajaran.

Keberhasilan pengajaran pendidikan politik didasarkan pada dua hal yang dijadikan patokan yaitu metode dan media yang digunakan. Metode yang biasanya digunakan dalam proses belajar adalah metode primer, metode sekunder dan metode tresier, disini pemerintah diberikan amanah sebagai penanggungjawab. Selain itu ada juga metode informal, non formal dan formal yang biasanya juga digunakan. Sedangkan untuk media yang digunakan ada dua yaitu media langsung dimana warga negara terlibat aktif dalam pembelajaran dengan adanya interaksi melalui forum diskusi, presentasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Media langsung ini banyak memiliki kelebihan karena lebih banyak memberikan manfaat dan media tidak langsung dimana warga negara tidak terlibat langsung dalam pembelajaran, media ini biasanya digunakan untuk forum yang sangat banyak dihadiri oleh individu-individu (Handoyo & Lestari, 2017: 131-133). Hal ini sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh pemateri selama pelaksanaan program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama Yaitu metode dan media pembelajaran yang tidak mendikte dan tepat untuk para peserta seperti adanya curah pendapat, presentasi, diskusi kelompok, merangkai ulang, diskusi panel, penugasan individu, games, sharing pengalaman, pendampingan, dialog, releksi, dan meditasi.

Penggunaan metode dan media yang tepat dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama diyakini dapat membawa pengaruh terhadap keberhasilan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik. Hal tersebut senada dengan pendapat Sakat et al. (2012: 874) yang mengatakan bahwa metode dan media pembelajaran yang tepat dapat merangsang proses pembelajaran yang efektif dan dapat meningkatkan interaktivitas antar peserta.

Di Indonesia materi dan kurikulum tentang proses pendidikan politik bagi generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda meliputi: 1) penanaman kesadaran untuk berideologi, berbangsa, dan bernegara; 2) menciptakan kehidupan dan kerukunan hidup beragama; 3) motivasi untuk

berprestasi; 4) pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia; 5) pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keikutsertaan dalam politik; 6) disiplin pribadi, sosial, dan nasional; dan 7) kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan menurut Handoyo & Lestari (2017: 77) substansi materi pendidikan politik yang diberikan kepada warga negara harus memuat tentang negara, pemerintah, partai politik, lembaga perwakilan, sistem pemerintahan, wakil rakyat, demokrasi, hak asasi manusia, gender, politik, dan globalisasi. Hal ini sesuai dengan materi yang diberikan oleh Yayasan Satunama dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda yaitu: materi etika politik, charater building, analisis sosial politik, analisis kebijakan, komunikasi politik, manajemen konflik, partai politik, sistem politik, perilaku pemilih, *marketing politics*, strategi membangun konstituen, komunikasi politik, analisa dan penyusunan kebijakan publik, menyusun strategi thinking dalam bidang politik, *value building* dan *living value*, dan pembuatan dan finalisasi kertas kebijakan. Selama kelas berlangsung peserta harus turun kelapangan mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi ke masyarakat dengan asistensi dan pendampingan. Data dan permasalahan tersebut harus disusun menjadi rencana aksi politik.

Ada beberapa kompetensi yang diajarkan dalam materi pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama yaitu leadership, sosial, pengetahuan politik, elektoral, value dan resiliensis. Merupakan kompetensi yang sejalan dengan aspek pendidikan politik yang diajarkan melalui beberapa ranah di antaranya sebagai berikut: 1) aspek kognitif ini berusaha menciptakan warga Negara yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman politik terhadap rancangan-rancangan politik dasar sangat penting untuk dikonstruksikan karena mempengaruhi tingkat kesadaran politik yang aktif untuk berpartisipasi politik dalam kehidupan politik; 2) aspek afektif ini berusaha untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan politik kepada warga negara yang diharapkan akan berpengaruh terhadap karakter warga negara. nilai-nilai demokrasi yang diajarkan yaitu nilai kebebasan, nilai tanggung jawab, nilai kemandirian, nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai pluralisme, kemajuan dan perdamaian dan; 3) aspek psikomotorik ini berusaha untuk membentuk warga negara yang memiliki kecakapan, warga negara harus mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari kelompok tertentu. Selain itu warga negara juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemauan berpartisipasi (Handoyo & Lestari, 2017: 24-56).

Selama pelaksanaan pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama. Dewan pengurus program sekolah politisi muda berusaha mengundang narasumber atau pemateri yang ahli dan berkompeten dibidangnya untuk mendukung proses pembelajaran pelaksanaan program sekolah politisi muda tersebut. Sehingga hal tersebut membawa pengaruh terhadap kualitas pembelajaran program sekolah politisi muda menjadi lebih baik. Dengan harapan setelah melaksanakan program sekolah politisi muda para peserta nantinya mendapatkan pengalaman, wawasan, ilmu, dan pengetahuan yang mendalam tentang dunia politik. Sehingga para peserta menyadari bahwa peran, hak dan kewajiban individu dalam dunia politik mampu membawa dampak baik terhadap kesejahteraan negara. Salah satu komponen penting yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran adalah kualitas guru (Arwildayanto et al. 2018: 199). Selain itu, Yayasan Satunama menyediakan sarana prasarana yang cukup lengkap selama proses pelaksanaan pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda. Sarana dan prasaran yaitu buku belajar, kelas yang nyaman, wifi, penginapan, tempat ibadah, konsumsi, kamar mandi, ruang makan, ruang santai, dapur, transportasi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang ingin dicapai.

Selama proses belajar mengajar program sekolah politisi muda para peserta cukup aktif dan disiplin. Hal itu ditunjukkan dari beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan dan

memberikan tanggapan pada sesi diskusi maupun pada saat pemateri mempersilahkan untuk memberi pertanyaan maupun pernyataan. Serta mengikuti rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Akan tetapi, masih ada peserta yang tidak aktif dan disiplin selama mengikuti rangkaian pelaksanaan program sekolah politisi muda. Dewan pengurus program sekolah politisi muda dan pemateri berusaha memberi pendampingan agar peserta tersebut dapat semangat, aktif dan disiplin selama mengikuti proses belajar mengajar program sekolah politisi muda. Setiap manusia memiliki kadar penyakit mental yang berbeda-beda. Dalam proses belajar mengajar seorang guru akan menemukan reaksi yang berbeda-beda. Yang pertama reaksi para peserta didik yang aktif, semangat dan antusias selama mengikuti proses belajar dan yang kedua reaksi para peserta didik yang diam, malas, dan tidak antusias. Untuk itu, para pendidik perlu melakukan pendekatan dan pendampingan kepada peserta didik tersebut agar peserta semangat dan termotivasi dalam mengikuti proses belajar (Maulidia, 2009: 129-130). Pelaksanaan program sekolah politisi muda yang diikuti para peserta berlangsung tertib. Tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang merusak jalannya acara, sehingga jalannya acara program sekolah politisi muda berlangsung kondusif, dari kondusif menjadi efektif karena program yang dilangsungkan sesuai dengan acara yang direncanakan.

Kriteria penilaian peserta yang mengikuti program sekolah politisi muda dilihat dari beberapa aspek seperti kehadiran peserta selama rangkaian kegiatan program sekolah politisi muda, tugas-tugas yang dikumpulkan atau dikerjakan selama mengikuti program sekolah politisi muda, keaktifan dan kedisiplinan para peserta selama mengikuti program sekolah politisi muda lain sebagainya. Kriteria penilaian para peserta program sekolah politisi muda terdapat dalam program brief. Assessment atau penilaian dalam proses pembelajaran harus dilakukan agar mendapatkan informasi sejauhmana peserta didik memahami kompetensi yang diajarkan, menemukan kelemahan kesulitan belajar dan prestasi peserta didik, dan menemukan kelemahan atau kekurangan proses pembelajaran (Poerwanti, 2015: 41).

Disamping itu, program sekolah politisi muda dikatakan efisien, karena lokasi pelaksanaannya yang bertempat di kantor Yayasan Satunama Yogyakarta tempatnya berada tepat didepan para peserta menginap dan mudah juga dijangkau oleh para peserta yang tinggal di Yogyakarta. Memastikan keberlanjutan program suatu organisasi menjadi sangat penting. Proses persiapan program dan tempat program dijalankan menjadi bagian penting karena dapat menentukan keberlanjutan program berbasis kemasyarakatan yang dijalankan oleh organisasi berbasis komintas dan nirbala (Ceptureanu et al. 2018: 2).

Evaluasi program sekolah politisi muda diadakan secara rutin oleh dewan pengurus dengan melakukan pengamatan langsung, meminta pendapat langsung dari para peserta program sekolah politisi muda dan menerima semua masukan dan saran dari semua pihak yang terlibat. Yang menjadi bahan evaluasi tahun ini adalah tentang buku evaluator, kurikulum, perangkat pembelajaran, subansi manajemen, alokasi waktu, dan anggaran. Proses evaluasi mengundang seluruh dewan pengurus program sekolah politisi muda dengan cara musyawarah dan mufakat. Setelah menemukan solusi yang tepat maka kepala sekolah program sekolah politisi muda akan berkonsultasi dengan pembina dan pengurus Yayasan Satunama Yogyakarta untuk meminta saran dan masukan. Kemudian setelah mendapatkan saran dan masukan seluruh dewan pengurus program sekolah politisi muda akan mencoba melaksanakan solusi yang telah disepakati. Lembaga atau organisasi perlu mengadakan musyawarah dan evaluasi untuk menciptakan program yang berkualitas. Evaluasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang ingin dicapai. Para peserta program sekolah politisi muda diharapkan memiliki kesadaran diri untuk terus mengikuti semua kegiatan program sekolah politisi muda dari awal hingga akhir program tersebut. Karena program sekolah politisi muda merupakan wadah bagi para politisi muda untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, ilmu, dan pengalaman tentang politik agar kelak

menjadi politisi muda yang berintegritas, bebas korupsi, beretika, dan berkualitas. Karena pengalaman belajar tidak hanya mempersiapkan para peserta didunia nyata, tetapi pengalaman belajar juga mempersiapkan sumber daya penting bagi partisipasi politik para peserta. Partisipasi politik anak muda dapat menyuarakan aspirasi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang bertentangan (Quintelier, 2010: 137).

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Program Sekolah Politisi Muda sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif

Keterlibatan generasi muda dalam pendidikan politik merupakan salah satu usaha agar membentuk kepribadian politik generasi muda menjadi kuat dalam mengawal dan terlibat diperjalanan politik. Pendidikan politik yang diberikan kepada pemuda akan mendorong pemuda untuk turut terlibat dalam dunia politik. Keterlibatan pemuda ini dapat mendukung berjalannya arus politik yang lebih baik. Sehingga arus perjalanan politik suatu negara akan semakin kuat karena adanya pemuda yang mau menjadi bagian dari politik (Balzter et al. 2017: 21).

Pelaksanaan program sekolah politisi muda yang dilakukan oleh Yayasan Satunama Yogyakarta tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan yaitu tujuan program, struktur organisasi, sumber dana, manajemen pengelolaan organisasi, sarana prasarana, citra baik organisasi, dan lokasi organisasi (Ghani et al. 2010: 6-8).

Pertama, tujuan program digunakan sebagai pedoman untuk menentukan keberhasilan dari suatu program. Tujuan program ditentukan sebelum sebuah program atau kegiatan dilaksanakan. Yayasan Satunama Yogyakarta memiliki tujuan untuk menciptakan Indonesia yang beragama, beradab, berkelanjutan, memperjuangkan hak dasar dan kewajiban warga negara, mengembangkan tata hidup demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, mengutamakan pelestarian lingkungan, dan memperkuat negara untuk memenuhi hak-hak konstitusi warga negara. Program sekolah politisi muda merupakan program yang memberdayakan dan memberikan pendampingan kepada para politisi muda untuk mengenal hak dan kewajiban setiap individu sangat penting bagi arah politik suatu negara. Mampu melahirkan politisi muda yang mempunyai strategi politik yang jelas, berintegritas, beretika, berkualitas dan bersih dari korupsi. Dapat dikatakan bahwa Yayasan Satunama Yogyakarta berhasil membuat program yang sesuai dengan tujuan utamanya dalam sebuah organisasi.

Kedua, struktur organisasi merupakan sumber daya manusia yang tergabung dalam organisasi. Yang disetiap organisasi memiliki pembagian tugas masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas ini maka setiap orang memiliki tanggungjawabnya sendiri dan dengan adanya pembagian tugas maka tidak akan ada tumpang tindih tugas. Sumber daya manusia yang tergabung dalam Yayasan Satunama telah melewati tahap rekrutmen yang cukup ketat. Calon anggota akan melewati beberapa kali seleksi yang ketat, mulai dari seleksi pemberkasan, tes dan wawancara. Yayasan Satunama mengadakan rekrutmen anggota baru secara terbuka melalui pengumuman diwebsite resminya. Rekrutmen anggota baru diadakan sewaktu-waktu jika ada posisi yang kosong di Yayasan Satunama membutuhkan anggota baru. Struktur organisasi di Yayasan Satunama memiliki terdiri dari beberapa departemen yaitu Departemen Penguatan Masyarakat, Departemen Politik Demokrasi dan KBBIS, Departemen Riset, Knowledge Sector Development dan Media, Departemen HRD, Departemen Keuangan, Departemen Interlokutor, Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas, Departemen Training dan Konsultasi, dan Departemen Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan.

Ketiga, sumber dana atau keuangan. Untuk sumber dana Yayasan Satunama Yogyakarta berasal dari kerjasama dan donator dengan beberapa mitra diantaranya *Misereor*, *The Asia Foundation*, *Konrad Adenauer Stiftung*, dan *Australian Volunteers International*. Selain itu, Yayasan Satunama Yogyakarta juga pernah menjalin kerjasama dengan *USC*

Canada, Australian AID, UNDP, Canadian International Development Agency, Oxfam International, Hivos, Mercy Corps International, TIFA, USAID, GTZ, BMZ, Kinder, dan UNDEF. Sedangkan program sekolah politisi muda bekerjasama dengan beberapa partai politik seperti DPP, DPD maupun DPW yang berada ditingkat partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Gerindra, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setiap anggaran program di Yayasan Satunama Yogyakarta mendapatkan audit keuangan oleh auditor independen, baik audit untuk keuangan program donor maupun keuangan organisasi. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, Yayasan Satunama melalui departemen keuangan menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan program secara periodik kepada para *stakeholder*.

Keempat, manajemen pengelolaan organisasi merupakan seni dalam mengatur organisasi mulai dari menyusun perencanaan sampai evaluasi. Yayasan Satunama Yogyakarta memiliki perencanaan, pengorganisasian, pegawaiian, pengarahan, dan pengawasan dalam setiap programnya. Misalnya program sekolah politisi muda yang dibuat oleh Yayasan Satunama memiliki perencanaan, pengorganisasian, pegawaiian, pengarahan, dan pengawasan.

Kelima, sarana prasarana berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh organisasi dan merupakan unsur yang harus ada. Yayasan Satunama Yogyakarta menyediakan sarana prasarana yang cukup lengkap. Misalnya, dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda dilengkapi dengan sarana pra sarana yang cukup lengkap untuk mendukung kelancaran berjalannya program tersebut. Sepertinya adanya sarana prasarana buku belajar, kelas yang nyaman, wifi, penginapan, tempat ibadah, konsumsi, kamar mandi, ruang makan, ruang santai, dapur, transportasi, perpustakaan, dan lain sebagainya.

Keenam, citra baik organisasi, dan lokasi organisasi membawa pengaruh penting terhadap keberhasilan karir organisasi. Yayasan Satunama Yogyakarta memiliki citra yang baik sepanjang karirnya hal ini bisa dilihat dengan banyaknya mitra yang bekerjasama dengan Yayasan Satunama baik dari tingkat nasional maupun internasional. Yayasan Satunama Yogyakarta juga berada dilokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh semua pihak dengan menggunakan jenis kendaraan mobil maupun motor dan dapat diakses melalui *google maps*.

Berdasarkan keenam faktor pelaksanaan program diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda yang dilakukan oleh Yayasan Satunama Yogyakarta telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh Yayasan Satunama. Namun, keberhasilan tersebut tidak diperoleh dengan mudah. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program sekolah politisi muda yang dilakukan oleh Yayasan Satunama Yogyakarta. Faktor penghambat berasal dari faktor internal dan eksternal Yayasan Satunama Yogyakarta.

Faktor internal yang menghambat pelaksanaan program sekolah politisi muda berasal dari semangat dan pengetahuan peserta itu sendiri. Salah satu penyebabnya adanya rasa malas, lelah dan bosan yang membuat semangat dan motivasi peserta menurun. Setiap manusia memiliki perasaan dan perasaan manusia bersifat subjektif karena setiap orang memiliki tingkat daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ketika merasa lelah solusi yang dibutuhkan adalah istirahat agar dapat segar kembali (Verawati: 2016: 51-60). Sementara itu, untuk hambatan yang berasal dari faktor eksternal program sekolah politisi muda berasal dari alokasi waktu dan anggaran. Adanya kegiatan yang berlangsung dari pagi sampai sore atau malam karena ini berhubungan dengan ketersediaan dana dan masalah pandemik covid 19 ini juga membatasi pelaksanaan program sekolah politisi muda karena membatasi ruang gerak pelaksanaan program sekolah politisi muda. Pelaksanaan pendidikan politik bisa terhambat apabila kurang maksimalnya pelaksanaan pendidikan politik (Rahman & Suharno, 2019:

289).Pelaksanaan program sekolah politisi muda tidak terlepas dari berbagai macam faktor penghambat, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor yang menghambat harus diatasi agar program sekolah politisi muda bisa berjalan lebih baik kedepannya dan memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu Yayasan Satunama Yogyakarta mengambil beberapa langkah atau upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama Yogyakarta.

Dewan Pegurus Yayasan Satunama Yogyakarta dan pemateri program sekolah politisi muda memiliki beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang berasal dari faktor internal yaitu dengan memberikan pendampingan kepada para peserta program sekolah politisi muda. Menurut Ng & Yuen (2015: 1077-1081) keterlibatan atau pendampingan dalam memberi motivasi akan membangun hubungan yang dinamis dengan para peserta dan bermanfaat bagi perkembangan sosial dan akademik para peserta. Pendampingan yang dilakukan antara dewan pengurus dan pemateri terhadap para peserta akan memberi semangat bagi para peserta agar terus semangat dan konsisten dalam mengikuti rangkaian kegiatan program sekolah politisi muda.

Sementara itu, upaya yang dewan pengurus Yayasan Satunama Yogyakarta untuk mengatasi hambatan eksternal terkait pelaksanaan program sekolah politisi muda, antara lain dengan mengadakan musyawarah dengan seluruh dewan pengurus untuk mendapatkan solusi yang tepat dari setiap permasalahan. Musyawarah yang dilakukan oleh dewan pengurus Yayasan Satunama untuk mencari solusi yang tepat terkait pelaksanaan program sekolah politisi muda. Misalnya, hambatan terkait alokasi waktu maka dewan pengurus akan mencoba membuat jadwal kegiatan program sekolah politisi muda berjalan tidak berlangsung sampai sore atau malam dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Sementara itu, pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik di Yayasan Satunama Yogyakarta memiliki beberapa faktor pendukung yang berasal dari faktor internal dan eksternal diantaranya: tujuan program, struktur organisasi, sumber dana, manajemen pengelolaan organisasi, sarana prasarana, citra baik organisasi, dan lokasi organisasi. Selain keenam faktor pendukung tersebut, ada juga faktor lain yang mendukung pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik di Yayasan Satunama Yogyakarta yaitu: *Pertama*, adanya respon positif dari para peserta yang telah mengikuti program sekolah politisi muda. Para alumni program sekolah politisi muda memberi respon agar pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda dapat terus dilaksanakan karena para alumni merasa bahwa program ini membawa dampak positif terhadap pengetahuan dan wawasan politik untuk para politisi muda yang akan menjadi bekal dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Kedua, keberhasilan para alumni program sekolah politisi muda yang terpilih menjadi anggota legislatif. Sebanyak 5 orang alumni peserta program sekolah politisi muda berhasil terpilih menjadi DPRD pada pemilihan legislatif tahun 2019. *Ketiga*, adanya dukungan dari dewan pengurus Yayasan Satunama dan para mitra yang telah bekerjasama dalam menjalankan program sekolah politisi muda. Dukungan dari pihak internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program sekolah politisi muda merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya pendidikan politik melalui program sekolah politisi muda. *Keempat*, adanya mahasiswa yang melaksanakan penelitian di Yayasan Satunama.

KESIMPULAN

Banyaknya permasalahan politik mengidentifikasi bahwa pendidikan politik di negara Indonesia perlu ditingkatkan. program sekolah politisi muda merupakan gerakan yang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengetahuan tentang politik. Yayasan Satunama telah banyak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama Implementasi program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik bagi calon

anggota legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta dilihat dari aspek persiapan atau perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. *Pertama*, persiapan program sekolah politisi muda didukung dengan adanya perangkat pembelajaran menggunakan program brief, metode dan media yang tepat untuk para peserta, materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, buku atau modul yang digunakan juga beragam, pemateri yang berkompeten dibidangnya, sarana prasarana yang memadai dan dukungan dari pihak internal dan eksternal. *Kedua*, pelaksanaan program sekolah politisi muda terlihat para peserta yang cukup aktif dan disiplin selama mengikuti program sekolah politisi muda. *Ketiga*, evaluasi dilakukan secara rutin oleh dewan pengurus sesudah pelaksanaan program sekolah politisi muda dari Departemen Politik dan Demokrasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan membagikan angket langsung kepada para peserta dan evaluasi tahun ini menyangkut kurikulum, perangkat pembelajaran, buku evaluator, alokasi waktu, anggaran, dan strategi manajemen.

Kedua Faktor penghambat dan faktor pendukung program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik bagi calon anggota legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta berasal dari internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari semangat dan pengetahuan para peserta itu sendiri dan hambatan eksternal berasal dari alokasi waktu dan anggaran. Kemudian faktor pendukung pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik bagi calon anggota legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta, yakni: *Pertama*, adanya respon positif dari para peserta yang telah mengikuti program sekolah politisi muda. *Kedua*, keberhasilan para alumni program sekolah politisi muda yang terpilih menjadi anggota DPRD. *Ketiga*, adanya dukungan dari dewan pengurus Yayasan Satunama dan para mitra yang telah bekerjasama dalam melaksanakan program sekolah politisi muda. *Keempat*, adanya mahasiswa yang melaksanakan penelitian tentang program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama Yogyakarta.

REFERENSI

- Arter, D. (2006). Introduction: Comparing the legislative performance of legislatures. *The Journal of Legislative Studies*, 12(3-4), 245–257. doi:10.1080/13572330600875423.
- Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W., T. (2018). *Analisis kebijakan pendidikan (kajian teoretis, eksploratif, dan aplikatif)*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Balzter, N., Ristau, Y., & Schröder, A. (2017). Political youth education in Germany. Presenting a qualitative study on its biographically long-term effects. *Journal of Social Science Education*, 16(1). Doi: 10.2390/jsse-v16-i1-1560. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1139479.pdf>
- Ceptuneanu, S. I., Ceptuneanu, E. G., Luchian, C. E., & Luchian, I. (2018). Community based programs sustainability. A multidimensional analysis of sustainability factors. *Sustainability*, 10(3), 870.
- Ghani, K., D., A., Nayan, S., Ghazali, S., A., I., S., M., Shafie, L., A., & Nayan, S. (2010). Critical internal and external factors that affect firmsstrategic planning. *International Research Journal of Finance and Economics*.
- Handaningrum, R., & Rini, R., A., P. (2015). Persepsi terhadap kualitas calon legislatif dan kepercayaan politik (political trust) dengan partisipasi politik. *Jurnal Psikologi Indonesian*, 3(3), 223-236. Doi: [10.30996/persona.v3i03.1578](https://doi.org/10.30996/persona.v3i03.1578). Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/1578/1337>.
- Handoyono, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

- Jumadi & Yakoop, M., R. (2013). . Etnisitas sebagai instrumen politik dan keamanan di Kalimantan Barat pasca rezim orde baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 17-34. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10891/8132>.
- Koop, R., & Bittner, A. (2011). Parachuted into parliament: Candidate nomination, appointed candidates, and legislative roles in Canada. *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, 21(4), 431–452. doi:10.1080/17457289.2011.609297.
- Kus, Z., & Tarhan O. (2016). Political education in social studies classrooms: a perspective from Turkey. *Journal of Theory and Practice in Education*, 12(3), 464-483. Retrieved from <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262352>.
- Keman, H., & Woldendorp, J. (2016). *Handbook of Research Methods and Applications in Political Science*. doi:10.4337/9781784710828.
- Maulidia, R. (2009). Problem malas belajar pada remaja (sebuah Analisis Psikologis). *At-Ta'di*, 4(2).
- MacWilliam, S., & Rafferty, M. (2017). From development and grand corruption to governance. *International Journal for Crime, Justice and School Democracy*, 6(4): 12-28. Doi: 10.5204/ijcjsd.v6i4.443.
- Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya KPU Kota Solok menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik. *Journal of Civic Education*, 2(1), 67-75.
- Nasution, M., A. (2012). Peranan parpol dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. *Jurnal POLITEIA*. 4(1). Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/view/16099>.
- Ng, S. W., & Yuen, G. (2015). Exploring teaching professionals' constraints in implementation of parental involvement in school education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 191, 1077-1081.
- Nilgun, D., A., G., Sozer, M., A., & Sel, B. (2015). Political education in school. *Educational Research and Reviews*, 10(14), 1881-1887. Doi:10.5897/err2015.2330.
- Poerwanti, E. (2015). *Konsep dasar asesmen pembelajaran*. Retrieved from <http://storage.kopertis6.or.id/kelembagaan/Applied%20Approach/MATERI/Drs.%20Suwarno,%20M.Si/1-Konsep-Dasar-Asesmen-Pembelajaran.pdf>
- Pittoors, G. (2020). Living apart together? The organization of political parties beyond the nation-state: The Flemish case. *Politics and Governance*, 8(1), 50-60.
- Quintelier, E. (2010). The effect of schools on political participation: a multilevellogistic analysis. *Research Papers in Education*, 25(20), 137–154.
- Quraishi, U., & Rahman, F. (2009). Political education for democracy in schools. *Journal of Research*, 25(1), 25-36.
- Rizkiansyah, F. K. (2014, 28 Maret). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Turun. *Unpad Merspons: Jelang Pileg 2014, Bagaimana Kecenderungan Sikap Rakyat?* <https://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/> diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 12.04.
- Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajdukovic, D., Biruski, D., C., & Cummings, E. M. (2015). The political socialization of youth in a post-conflict community. *International Journal of Intercultural Relations*, 45, 11-23. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.12.005>.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Sakat, A., S., Zin, M., Z., M., Muhammad, R., & Ahmad, A. (2012). Educational Technology Media Method in Teaching and Learning Progress. *American Journal of Applied Sciences* 9 (6), 874-878.

- Srinita. (2016). Strategi menihilkan korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(2). Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/179/97>.
- Sirivunnabood, P. (2016). Political education: the role of political parties in educating civil society on politics. *Journal of Social, Humanities and Arts*, 16(3), 157-194. Retrieved from <https://tci-thaijo.org/index.php/hasss/article/view/73187/58895>.
- Verawati, L. (2016). Hubungan tingkat kelelahan subjektif dengan produktivitas pada tenaga kerja bagian pengemasan di CV Sumber Barokah. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 5(1), 51-60.
- Williams, J. R. (1967). *Political Recruitment to the Ontario Legislative Assembly: A Research Schema* (Doctoral dissertation).
- Zhang, C., & Fagan, C. (2016). Examining the role of ideological and political education on university students' civic perceptions and civic participation in Mainland China: Some hints from contemporary citizenship theory. *Citizenship, Social and Economics Education*, 15(2), 117–142. doi:10.1177/2047173416681170.